

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa, kebutuhan akan harmonisasi kewenangan antara kementerian perhubungan dan kementerian pekerjaan umum sangat dibutuhkan untuk optimalisasi pengembangan lalu lintas jalan. Harmonisasi ini tentunya juga harus berdasarkan pemberian atas kemampuan dan kebutuhan. Serta adanya sebuah pelimpahan kewenangan antar kementerian dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Tujuan utama dalam melakukan harmonisasi ini adalah untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, akuntabel, efisien dan optimal. Dampak yang akan diberikan dalam melakukan kegiatan harmonisasi ini akan langsung memberikan pengaruh terhadap pemberian pelayanan publik terkait dengan lalu lintas. Diharapkan dengan adanya harmonisasi kewenangan dalam pengaturan lalu lintas ini dapat mempercepat tugas pokok dan fungsi untuk pemberian pelayanan serta pengembangan lalu lintas menjadi lebih baik.
2. Terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh kementerian perhubungan dan kementerian pekerjaan umum dalam fungsi yang sama dalam pengembangan lalu lintas jalan. Harmonisasi kewenangan ini dilakukan karena dalam prakteknya fungsi yang dimiliki mengatur satu objek yang sama. Dengan demikian harmonisasi ini diberikan untuk melakukan optimalisasi pelayanan dalam bidang lalu lintas jalan untuk menjadi lebih baik. Kewenangan yang

diberikan kepada kementerian perhubungan merupakan pilihan tepat, karena dalam salah satu tugasnya kementerian perhubungan melakukan kebijakan dan perumusan dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas jalan. Kewenangan yang dimiliki oleh kementerian ini, diharapkan bisa membuat kebijakan yang lebih baik dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang lalu lintas jalan.

B. Saran

Penulis dapat memberikan saran atau masukan kepada pihak-pihak terkait harmonisasi kewenangan antara kementerian perhubungan dan kementerian pekerjaan umum:

1. Bagi pemerintah, sebaiknya menjadikan kewenangan kementerian pekerjaan umum di bidang penyelenggaraan dan rekayasa lalu lintas angkutan jalan di delegasikan kepada kementerian perhubungan. Hal ini dibutuhkan dalam pengoptimalan pembangunan infrastruktur lalu lintas jalan dan angkutan umum.
2. Bagi Pembentuk UU untuk segera melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan lalu lintas angkutan jalan.
3. Peneliti berharap agar penelitian ini selanjutnya dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris, sehingga dapat diketahui bagaimana kondisi nyata yang ada di lapangan.